

P-ISSN: 2655-9811, E-ISSN: 2656-1964
J. Feasible., Vol. 7, No. 2, Agustus-Januari 2026 (167-174)
©2019 Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan
Universitas Pamulang (PINBIKUNPAM)

JURNAL ILMIAH
FEASIBLE
BISNIS, KEWIRAUSAHAAN & KOPERASI

Analisis Konseptual Tentang Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia

Seni Yanti Waruwu^{1*}, Hesti Nur Asnah Waruwu², Devi Setiawati³,
Raden Ai Lutfi Hidayat⁴

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
Tangerang Selatan, Indonesia

Seniyanti04@gmail.com^{1*}, waruwuepi7@gmail.com²,
devvi.setiawati@gmail.com³, dosen02243@unpam.ac.id⁴

Received 15 Desember 2025 | Revised 25 Desember 2025 | Accepted 02 Januari 2026

*Korespondensi Penulis

Abstract

Cooperatives hold a strategic position in Indonesia's national economic system as mandated by Article 33(1) of the 1945 Constitution, which emphasizes the principle of kinship as the foundation of the national economy. However, their role as the economic backbone has not been fully realized due to structural, managerial, and technological challenges. This study provides a conceptual analysis of the strategic role of cooperatives, the key factors influencing their effectiveness, and the opportunities and challenges arising in the digital era. Using a qualitative method through an extensive literature review of academic works, statistical reports, and legal frameworks, the study finds that cooperatives have strong potential to promote equitable economic distribution and enhance community empowerment. The findings indicate that economic democracy, professional management, and digital innovation significantly influence cooperative performance and sustainability. Increasing members' financial literacy, strengthening human resource capacity, and ensuring consistent government support are crucial for cooperative advancement. Digital transformation presents both opportunities and risks, requiring cooperatives to adopt technology, improve transparency, and strengthen governance. Overall, cooperatives can become an effective economic pillar when supported by an enabling ecosystem, sustained policy commitment, and strong member participation.

Keywords: *Cooperatives; Economic backbone; Economic democracy; Digitalization; Sustainable development.*

Abstract

Koperasi memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan sebagai landasan utama sistem ekonomi nasional. Namun, peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian belum sepenuhnya terwujud akibat berbagai tantangan struktural, manajerial, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual peran strategis koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitasnya, serta menelaah peluang dan tantangan yang muncul dalam era digitalisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka melalui pengkajian karya ilmiah, laporan statistik, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi yang kuat dalam mendorong pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan inklusif. Temuan studi menegaskan bahwa penerapan prinsip demokrasi ekonomi, profesionalisme manajemen, dan inovasi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan



koperasi. Selain itu, peningkatan literasi keuangan anggota, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten merupakan elemen penting dalam memperkuat peran koperasi. Transformasi digital juga menghadirkan peluang sekaligus risiko sehingga koperasi perlu beradaptasi melalui adopsi teknologi, peningkatan transparansi, dan penguatan tata kelola. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi dapat berfungsi optimal sebagai sokoguru perekonomian apabila ditopang oleh ekosistem yang kondusif, komitmen kebijakan yang berkelanjutan, serta partisipasi anggota yang kuat.

Kata Kunci: Koperasi; Sokoguru Perekonomian; Demokrasi Ekonomi; Digitalisasi; Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara ber-kem-bang menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, koperasi memiliki landasan filosofis dan konstitusional yang kuat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai dasar sistem perekonomian nasional. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi ekonomi yang bertujuan mendorong pemerataan ke-sejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional belum terwujud secara optimal. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan terdapat 131.617 koperasi aktif di Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6,2%, angka yang masih relatif rendah dibandingkan potensi koperasi dalam struktur ekonomi nasional. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas koperasi dalam kerangka konstitusional dan realitas implementasinya, yang disebabkan oleh berbagai kendala struktural, manajerial, rendahnya literasi keuangan anggota, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan koperasi, namun umumnya bersifat parsial dan lebih menekankan aspek operasional atau studi kasus tertentu tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan dimensi filosofis, konstitusional, dan dinamika transformasi ekonomi kontemporer. Research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian konseptual yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu

kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual peran strategis koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, sekaligus merumuskan prasyarat teoretis dan institusional agar koperasi mampu berfungsi optimal di era globalisasi dan digitalisasi.

Tinjauan Pustaka

Koperasi memiliki landasan filosofis kuat dalam ekonomi kerakyatan. Mubyarto (2019) menegaskan koperasi Indonesia dibangun atas sistem ekonomi Pancasila yang menekankan kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial—berbeda dengan kapitalisme yang berorientasi akumulasi modal individual maupun sosialisme yang mengedepankan kontrol negara penuh. Koperasi menempatkan manusia sebagai subjek ekonomi untuk kesejahteraan bersama, bukan mengejar keuntungan maksimal semata. Sumarsono (2021) menjelaskan istilah "sokoguru" merujuk pada pilar fundamental sistem ekonomi nasional, berakar dari Penjelasan UUD 1945 Pasal 33 yang menyatakan bangun usaha paling cocok dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Dengan demikian, koperasi bukan sekadar bentuk badan usaha, melainkan representasi cita-cita ekonomi bangsa yang mengedepankan demokrasi ekonomi dan kesejahteraan kolektif.

Hendar dan Kusnadi (2020) mengidentifikasi tujuh prinsip koperasi yang diakui International Cooperative Alliance (ICA): (1) keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) pengendalian demokratis oleh anggota, (3) partisipasi ekonomi anggota, (4) otonomi dan kebebasan, (5) pendidikan dan pelatihan, (6) kerjasama antar koperasi, dan (7) kepedulian terhadap

komunitas. Prinsip-prinsip ini membedakan koperasi dengan korporasi konvensional yang berorientasi profit semata. Dalam koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan berdasarkan partisipasi dan transaksi anggota, bukan modal yang disetor.

Teori ekonomi pembangunan menempatkan koperasi sebagai instrumen penting dalam redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Suharto (2020) menegaskan model pembangunan ekonomi berkeadilan mensyaratkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat kelas menengah ke bawah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Koperasi memberikan akses lebih luas bagi masyarakat ekonomi lemah untuk terlibat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara adil, sejalan dengan konsep *inclusive growth*.

Rahman (2022) menemukan tingkat literasi keuangan anggota berkorelasi positif dengan kinerja koperasi. Anggota dengan pemahaman baik tentang prinsip koperasi, manajemen keuangan, dan hak-kewajiban cenderung lebih aktif berpartisipasi dan berkontribusi. Pendidikan dan pelatihan anggota merupakan elemen esensial dalam membangun koperasi yang kuat dan berkelanjutan.

Penelitian bertujuan menganalisis secara konseptual peran strategis koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia berdasarkan landasan filosofis, historis, dan konstitusional; mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan; serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan koperasi yang efektif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis konseptual. Metode kualitatif dipilih karena menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep, gagasan, dan makna koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, bukan pengukuran

angka atau data statistik. Data berasal dari literatur: buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel penelitian terdahulu, dan laporan resmi terkait koperasi di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu menelaah, mengidentifikasi, dan menginterpretasikan sumber-sumber relevan.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) Reduksi data menyaring informasi dari berbagai sumber sesuai fokus penelitian; (2) Penyajian data menyusun hasil kajian dalam bentuk uraian naratif sistematis; (3) Penarikan kesimpulan merumuskan temuan konseptual mengenai peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Pendekatan ini memberikan gambaran luas dan komprehensif tentang pemahaman, penerapan, dan tantangan konsep koperasi dalam praktik, diharapkan memperkuat pemahaman teoretis sekaligus memberi masukan bagi pengembangan strategi dan kebijakan tepat sasaran.

HASIL dan PEMBAHASAN

Konsep koperasi sebagai sokoguru perekonomian berakar pada Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan koperasi sebagai bangun usaha yang paling sesuai dengan asas kekeluargaan. Istilah sokoguru merepresentasikan peran koperasi sebagai pilar utama penopang sistem ekonomi nasional, bukan sekadar pelaku usaha biasa. Pemikiran Mohammad Hatta menegaskan koperasi sebagai wujud konkret demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara (*one member, one vote*), sehingga menempatkan manusia sebagai subjek utama aktivitas ekonomi.

Secara normatif, koperasi di Indonesia mengadopsi tujuh prinsip International Cooperative Alliance (ICA) yang menekankan partisipasi anggota, pengelolaan demokratis, dan kepedulian terhadap komunitas. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi kendala signifikan. Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha koperasi cenderung rendah, sementara fungsi pendidikan anggota sering kali belum dijalankan secara optimal. Kondisi ini

berdampak pada lemahnya rasa memiliki dan rendahnya kinerja kelembagaan koperasi.

Tabel 1. Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2023–2024

Tahun	Jumlah koperasi	Kontribusi terhadap PDB (%)
2023	130.119	5,7%
2024	131.617	6,2%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024).

Data BPS menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi meningkat, kontribusinya terhadap PDB nasional masih terbatas. Mayoritas koperasi beroperasi dalam skala kecil dengan keterbatasan aset dan kapasitas manajerial. Keterbatasan tersebut diperparah oleh rendahnya literasi keuangan anggota dan akses pembiayaan yang belum inklusif. Akibatnya, koperasi belum mampu berperan signifikan dalam mendorong nilai tambah ekonomi dan daya saing nasional.

Transformasi digital menghadirkan peluang strategis sekaligus tantangan baru bagi koperasi. Digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, transparansi pengelolaan, serta memperluas akses pasar dan layanan bagi anggota. Studi menunjukkan koperasi yang mengadopsi teknologi digital cenderung mengalami peningkatan kinerja dan partisipasi anggota. Namun, adopsi teknologi masih terkendala keterbatasan sumber daya, kesenjangan literasi digital, serta infrastruktur yang belum merata, khususnya di wilayah perdesaan.

Pengalaman negara-negara dengan gerakan koperasi yang kuat seperti Jerman, Kanada, dan Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi ditopang oleh kombinasi regulasi yang konsisten, pendidikan koperasi yang terstruktur, manajemen profesional, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Perbandingan ini menegaskan bahwa penguatan koperasi di Indonesia tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif, tetapi memerlukan transformasi kelembagaan dan strategi pengembangan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi berpotensi menjadi sokoguru perekonomian apabila didukung oleh penguatan manajemen profesional, peningkatan literasi anggota, kebijakan

pemerintah yang konsisten, serta pemanfaatan teknologi digital secara inklusif. Tanpa upaya tersebut, koperasi berisiko tetap berada pada posisi marginal dalam sistem ekonomi nasional.

Tantangan dan Peluang di Era Digital

Era globalisasi dan transformasi digital membawa implikasi ganda. Di satu sisi, globalisasi menciptakan persaingan semakin ketat dengan masuknya produk dan layanan dari berbagai negara. Koperasi yang tidak mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk akan tersingkir. Liberalisasi perdagangan membuka peluang korporasi multinasional mendominasi pasar, mengancam eksistensi koperasi lokal yang umumnya beroperasi dalam skala kecil-menengah. Di sisi lain, globalisasi membuka peluang baru bagi koperasi mengakses pasar internasional, mengadopsi best practices dari negara lain, dan membangun kerjasama dengan gerakan koperasi global. Teknologi digital memberikan kesempatan menjangkau pasar lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan lebih baik. Platform e-commerce memungkinkan koperasi memasarkan produk online tanpa harus membangun toko fisik yang memerlukan investasi besar. Sistem informasi manajemen berbasis digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, meningkatkan kepercayaan anggota.

Penelitian Wijaya dan Pratama (2023) menunjukkan koperasi yang berhasil mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan kinerja signifikan. Digitalisasi memungkinkan pencatatan transaksi real-time, analisis data untuk pengambilan keputusan lebih baik, dan komunikasi dengan anggota lebih efektif melalui aplikasi mobile atau media sosial. Beberapa koperasi telah mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan anggota melakukan transaksi, mengakses informasi keuangan, dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi tanpa harus datang ke kantor.

Namun, transformasi digital menghadirkan tantangan tersendiri. Tidak semua koperasi memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mengadopsi teknologi digital. Investasi infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, dan pelatihan

SDM memerlukan biaya tidak sedikit. Kesenjangan digital antara koperasi di perkotaan dan perdesaan masih lebar, akses internet dan literasi digital di daerah terpencil masih terbatas. Transformasi digital memerlukan perubahan mindset dan budaya organisasi yang tidak selalu mudah, terutama bagi koperasi yang telah lama beroperasi konvensional.

Tantangan lain adalah keamanan data dan privasi anggota. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital, koperasi perlu memastikan sistem keamanan informasi memadai untuk melindungi data anggota dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Di Jerman, koperasi kredit memiliki peran sangat signifikan dalam sistem keuangan nasional. Lebih dari 30% penduduk Jerman menjadi anggota koperasi, dan koperasi kredit menguasai sekitar 20% pangsa pasar perbankan ritel. Keberhasilan didukung sistem pendidikan koperasi kuat, regulasi jelas, dan tradisi kerjasama yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Di Kanada, koperasi memiliki kontribusi ekonomi sangat besar dengan lebih dari 9.000 koperasi yang melayani 18 juta anggota. Koperasi Kanada beroperasi di berbagai sektor mulai pertanian, perumahan, ritel, hingga layanan keuangan. Pemerintah memberikan dukungan kuat melalui kebijakan fiskal menguntungkan, program pendampingan, dan penelitian pengembangan koperasi. Di Jepang, koperasi pertanian (JA Group) sangat maju. Koperasi pertanian tidak hanya mengelola produksi dan pemasaran hasil pertanian, tetapi juga menyediakan layanan keuangan, asuransi, dan bahkan layanan kesehatan bagi anggotanya. Model bisnis terintegrasi dan manajemen profesional membuat koperasi Jepang mampu bersaing dengan korporasi besar dan memberikan nilai tambah signifikan.

Dari perbandingan ini dapat diidentifikasi faktor sukses koperasi di negara maju: dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah konsisten; sistem pendidikan dan pelatihan koperasi terstruktur; manajemen profesional dan transparan; kemampuan beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi; jaringan kerjasama kuat antar koperasi; dan budaya koperasi yang

mengakar di masyarakat. Gerakan koperasi di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak era kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, koperasi pertama kali diperkenalkan R. Aria Wiriatmadja tahun 1896 dalam bentuk bank penolong dan tabungan untuk membantu para pegawai negeri pribumi yang terlilit rentenir. Pada era kemerdekaan, khususnya masa Orde Lama, koperasi mendapat perhatian besar dari pemerintah sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Bung Hatta aktif mempromosikan gerakan koperasi dan merumuskan konsep koperasi sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Masa Orde Baru ditandai intervensi pemerintah sangat kuat terhadap koperasi. Jumlah koperasi mengalami pertumbuhan pesat didorong program pemerintah, namun intervensi berlebihan membuat banyak koperasi kehilangan jati diri sebagai organisasi otonom dan demokratis. Koperasi menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam program pembangunan, sehingga ketika dukungan pemerintah berkurang, banyak koperasi kolaps.

Era reformasi membawa angin segar dengan lebih terbukanya ruang demokratisasi dan otonomi, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa liberalisasi ekonomi dan persaingan pasar semakin ketat. Data menunjukkan meskipun jumlah koperasi terus bertambah, tingkat keaktifannya mengalami fluktuasi. Pada 2024, dari total 131.617 koperasi terdaftar, hanya sekitar 60-70% yang benar-benar aktif beroperasi.

Analisis tren lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan pola menarik. Kontribusi koperasi terhadap PDB mengalami peningkatan dari 5,1% pada 2020 menjadi 6,2% pada 2024. Meskipun peningkatannya relatif moderat, tren positif ini mengindikasikan koperasi masih memiliki resiliensi dan potensi untuk berkembang, terutama didorong oleh koperasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengadopsi teknologi digital. Pandemi COVID-19 (2020-2022) memberikan dampak signifikan terhadap koperasi. Banyak koperasi mengalami penurunan kinerja akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Namun, pandemi juga menjadi catalyst bagi akselerasi digitalisasi koperasi. Koperasi

yang sebelumnya ragu mengadopsi teknologi digital terpaksa melakukan transformasi untuk tetap dapat melayani anggota. Beberapa koperasi yang sukses bertransformasi justru mengalami pertumbuhan karena mampu menjangkau pasar lebih luas melalui platform digital.

Profil Koperasi Indonesia Berdasarkan Data BPS 2024

Dari sisi distribusi geografis, sebagian besar koperasi terkonsentrasi di Pulau Jawa (45%), diikuti Sumatera (25%), Sulawesi (12%), Kalimantan (10%), dan sisanya tersebar di Indonesia Timur. Konsentrasi ini mencerminkan disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah, di mana wilayah dengan infrastruktur dan akses pasar lebih baik cenderung memiliki lebih banyak koperasi aktif. Dari sisi jenis usaha, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) masih mendominasi dengan porsi sekitar 40% dari total koperasi. Koperasi konsumen mencakup 25%, koperasi produsen 20%, dan koperasi pemasaran serta jenis lainnya 15%. Dominasi KSP/USP menunjukkan layanan keuangan masih menjadi kebutuhan utama anggota, namun juga mengindikasikan diversifikasi usaha koperasi masih perlu ditingkatkan.

Analisis kinerja keuangan menunjukkan rata-rata aset koperasi di Indonesia masih relatif kecil, yaitu sekitar Rp 750 juta per koperasi. Hanya sekitar 5% koperasi memiliki aset di atas Rp 10 miliar dan dapat dikategorikan sebagai koperasi besar. Keterbatasan aset ini membatasi kapasitas koperasi untuk mengembangkan usaha dan bersaing dengan pelaku usaha lain. Dari sisi profitabilitas, rata-rata Return on Asset (ROA) koperasi berkisar 3-5%, lebih rendah dibandingkan rata-rata ROA perbankan yang mencapai 8-10%, mengindikasikan efisiensi operasional koperasi masih perlu ditingkatkan. Data keanggotaan menunjukkan total anggota koperasi di Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 40 juta orang, atau sekitar 14% dari total populasi. Meskipun angka ini cukup besar, tingkat partisipasi aktif anggota masih rendah. Survei menunjukkan hanya sekitar 30-40% anggota aktif bertransaksi dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi secara reguler.

Dari sisi pendidikan anggota, data menunjukkan mayoritas anggota koperasi (55%) memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah, 35% berpendidikan diploma atau sarjana, dan 10% berpendidikan pasca-sarjana. Tingkat pendidikan berkorelasi dengan tingkat literasi koperasi dan literasi keuangan anggota. Anggota dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami prinsip dan mekanisme koperasi, serta lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan koperasi.

Keterbatasan Penelitian

Sebagai penelitian analisis konseptual berbasis studi pustaka, penelitian ini memiliki keterbatasan: tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara langsung dengan pelaku koperasi di lapangan, sehingga temuan lebih bersifat teoretis-konseptual; sumber data sekunder memiliki keterbatasan dalam kedalaman dan aktualitas informasi; bersifat deskriptif-analitis dan belum menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan kausal; dinamika perkembangan koperasi yang sangat cepat membuat sebagian informasi mungkin cepat usang; lebih banyak menganalisis koperasi secara umum tanpa diferensiasi detail berdasarkan jenis koperasi; komparasi terbatas terhadap praktik koperasi di negara lain; dan tidak secara khusus menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari koperasi. Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman konseptual tentang koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia dan membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan mendalam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian konseptual dan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai sokoguru perekonomian Indonesia sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (1). Secara filosofis dan historis, koperasi berlandaskan prinsip gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi yang mampu menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Data empiris menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah koperasi dan kontribusinya terhadap PDB nasional, meskipun kontribusi tersebut masih relatif kecil dibandingkan potensi yang dimiliki. Tantangan utama yang dihadapi koperasi adalah lemahnya manajemen, rendahnya literasi keuangan anggota, keterbatasan akses permodalan dan teknologi, serta belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah. Dengan transformasi manajerial, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi anggota, dan penguatan ekosistem pendukung, koperasi berpotensi menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional di era globalisasi dan digitalisasi.

REFERENSI

- Anugrah, F., & Rahayu, S. (2023). Analisis pengembangan digitalisasi koperasi dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(3), 469–480.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i3.3848>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik koperasi Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Faedlulloh, D. (2016). Membangun demokrasi ekonomi: Studi potensi koperasi multi-stakeholders dalam tata kelola agraria Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 65–76.
- Fadhilah, N. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 532–544.
- Fauzi, H. Z., Aflah, N., Setyamien, S. K., & Shafrani, Y. S. (2025). Analisis SWOT pada KSPPS BKK Bersama Kami Kasembadan Purwokerto. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 402–419.
- Hendar, & Kusnadi. (2020). *Ekonomi koperasi: Teori dan praktik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Ifa, K. R. (2024). Peran digitalisasi koperasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan di KSPPS BMT Alhikmah Semesta. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*, 1(1).
- Jaenudin, U. E., Rahayu, I., Farida, L., & Maulah, S. (2025). Koperasi 4.0: Menganalisis transformasi digital di Pesantren Assyukandary dan Sabilul Huda, mendorong inovasi di Kota Santri Tasikmalaya. *Strategic: Journal of Management Sciences*, 5(1), 1–13.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan pengembangan koperasi 2023*. Kemenkop UKM.
- Lenasari, R. P., Rizal, M., & Herawaty, T. (2023). Analisis governansi korporat pada koperasi (Studi kasus pada Koperasi Indosurya). *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(3), 987–998.
- Mubyarto. (2019). *Sistem dan prinsip ekonomi koperasi Indonesia*. LP3ES.
- Pradana, L. Y., & Husaein, A. (2023). Peningkatan pelayanan pada koperasi di Kota Jambi melalui digitalisasi koperasi. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 17(1), 106–115.
- Rahman, H. (2022). Peran literasi keuangan dalam penguatan kinerja koperasi. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 8(3), 72–83.
- Savira, B. A. B., & Januarti, I. (2020). Akuntabilitas koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 97–112.
- Sitepu, R. (2022). Tantangan dan peluang pengembangan koperasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 14(2), 101–115.
- Subagyo, A., & Anwar, K. (2025). Evolusi prinsip dan nilai koperasi: Analisis historis dan kontemporer. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*, 2(1), 27–31.
- Suharto, E. (2020). *Pembangunan ekonomi berkeadilan di era digital*. Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2021). *Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia: Analisis konseptual dan empiris*. Deepublish.
- Untoro, M. C., Kurniawansyah, A., Perdana, A. M. P., Praseptiawan, M., Nugroho, E. D., Afriansyah, A., & Verdiana, M. (2023). Digitalisasi informasi sebagai penunjang efektivitas pelayanan administrasi



- koperasi Argo Mulyo Lestari. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 121–133.
- Utami, R., & Hidayat, R. (2022). Membangun demokrasi ekonomi melalui model koperasi multi-stakeholder di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1). <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.356>
- Wijaya, D., & Pratama, A. (2023). Digitalisasi dan revitalisasi koperasi di era ekonomi global. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Digital*, 5(1), 45–59